

**STUDI KEBIJAKAN BELA BELI KULON PROGO
TENTANG BATIK *GEBLEK RENTENG* DI DESA GULUREJO**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Persyaratan Mendapatkan Gelar Strata Satu (S1)

Disusun Oleh :

Svaiful Isnanun Thoha

15230070

Pembimbing:

Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si.

198308112011012010

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUIKASI PENGEMBANGAN
MASYARAKAT ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-838/Un.02/DD/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KEBIJAKAN BELA BELI KULON PROGO TENTANG BATIK GEBLEK
RENTENG DI DESA GULUREJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIFUL ISNANUN THOHA, S.SOS
Nomor Induk Mahasiswa : 15230070
Telah diujikan pada : Senin, 14 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f73a7634a3be



Penguji II

Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 5f6f3f7648810



Penguji III

Drs. Mohammad Abu Suhud, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 5f71df0e93369



Yogyakarta, 14 September 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 5f768904df03b



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaiful Isnanun Thoha
NIM : 15230070
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Studi Kebijakan Bela Beli Kulon Progo Tentang Batik Geblek Renteng Di Desa Gulurejo

Sudah bisa diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 09 September 2020

Mengetahui

Ketua Prodi PMI

Pembimbing

Siti Aminah, S.Sos.,M.Si.
NIP. 198308112011012010.

Siti Aminah ,S .Sos.,M.Si.
NIP. 198308112011012010.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaiful Isnanun Thoha
NIM : 15230070
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya berjudul *Studi Kebijakan Bela Beli Kulon Progo Tentang Batik Geblek Renteng Di Desa Guhurejo* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 September 2020

Yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syaiful Isnanun Thoha

15230070

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

KARYA INI PENELITI PERSEMBAHKAN UNTUK:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Bapak Sunarto dan Ibu Siti Muafiorah

...Allahummarhama kama rabbayani sagira...

Terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan kepada ayah dan ibu yang tak henti hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang shaleh dan yang selalu hadir di hati ananda baik dikala susah maupun senang.

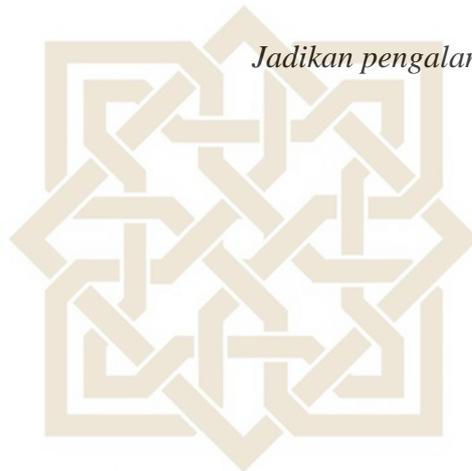
Mas Eko, Mas Aziz, Mbak Ghina. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal kesuksesanku ini dapat membanggakan kalian.

MOTTO

Jika ada yang mudah kenapa

Mencari yang sulit

Jadikan pengalaman guru terbaik untukmu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan hidayah kepada Allah subhanahu wata'ala yang MAha Pengasih dan Penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Studi Kebijakan Bela Beli tentang Batik Geblek Renteng di Desa Gulurejo.*” Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju alam yang berilmu pengetahuan serta menjadi sosok yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kemudian.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof.Dr. Hj. Ema Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Ibu Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si, selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam beserta para stafnya.
4. Ibu Siti Aminah, S.sos.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan nasehat dan motivasi.
5. Segenap dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga studi ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Sunarto dan Ibu Siti Muafiorah terimakasih yang tak pernah lelah untuk mendoakan, meridhoi setiap langkah kaki ini, memberikan motivasi dan dukungan baik secara material dan moral sehingga dapat menghantarkan penulis mencapai gelar sarjana.
7. Seluruh staf Pemerintahan Desa Gulurejo, terutama Bapak Joko yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.

8. Sentra Batik Sembung dan Batik Sembayung (Bapak Girin dan Bapak Purnomo) yang telah mendampingi dan memebrikan arahan penulis untuk dapat terjun ke lapangan.
9. Kepada sahabat-sahabat baik dari STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Aziz dan Eko.
10. Teman-teman Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) angkatan 2015.
11. Kepada Ghina Azizah Azhary yang telah membantu dan memotivasi penulis.
12. Tak lupa pula penulis Mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memeberikn dukungan yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.

Jazakumullah khairun

Skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan dan kesalahan. Untuk itu mohon saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Serta semoga karya sederhana ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 08 September 2020
Penulis,

Syaiful Isnanun Thoha

NIM. 15230070

ABSTRAK

Syaiful Isnahun Thoha, Studi Kebijakan Bela-Beli Kulon Progo Tentang Batik Geblek Renteng di Desa Gulurejo. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang kesuksesan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di daerahnya melalui kebijakan bernama Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Kebijakan yang dicanangkan oleh Bupati Hasto Wardoyo ini merupakan gerakan sosial yang dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan berlandaskan aspek pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menjadikan implementasi serta evaluasi dari kebijakan bela-beli batik *Geblek Renteng* sebagai permasalahan utama. Penelitian ini juga menjadikan Desa Gulurejo Kecamatan Lendah sebagai tempat penelitian utama. Hal ini dikarenakan di Desa tersebut terdapat banyaknya pembatik yang sukses menjadi pengusaha atau pemilik Industri batik besar di Kulon Progo.

Jenis penelitian ini berbentuk *field research* (penelitian lapangan) yang akan banyak berpatokan pada data-data observasi terkait subjek penelitian, yakni kebijakan bela-beli *Geblek Renteng*. Untuk mendapatkan data-data di lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dalam pengolahan datanya menggunakan teknik pengolahan data deskripsi. Data tersebut kemudian dinarasikan dengan menggunakan teori kebijakan publik sebagai tumpuan dasarnya, serta teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai tumpuan analisisnya.

Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa implementasi dari kebijakan bela-beli geblek renteng di desa Gulurejo berjalan sukses serta berdampak positif bagi warga Gulurejo. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, *Pertama*, tingkat partisipasi masyarakat yang aktif serta kreatif dalam mengartikan peluang serta tantangan yang disediakan pasca-diberlakukannya kebijakan. *Kedua*, masyarakat Gulurejo yang diwakili oleh industri batik terus meningkatkan kualitas produksi dan nilai dari transaksi ekonominya dari tahun ke tahun. *Ketiga*, Pemerintah dalam proses implementasi ini bertugas sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan, dan penyuluhan bagi pertumbuhan industri batik. Serta turut menjadipenengah jika terjadi hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh para pembatik. Namun kebijakan ini tidaklah bebas dari kritikan. Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih mendetail terhadap pembatik sehingga proses pemberdayaan masyarakat menjadi tepat sasaran. Serta perlunya penyelesaian isu limbah batik dan kebijakan lain dalam menghadapi situasi luar biasa, seperti pandemi ataupun bencana alam.

Kata Kunci: Bela Beli Kulon Progo, Implementasi, Evaluasi, Kebijakan Publik, Geblek Renteng, Gulurejo, Industri Batik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	5
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Landasan Teori.....	20
H. Metode Penelitian.....	33
I. Sistematika Penulisan	37
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	39
A. Desa Gulurejo Sebagai Lokasi Penelitian	39
B. Sentra Industri Batik di Gulurejo	59
BAB III IMPLEMETASI DAN EVALUASI KEBJAKAN GEBLEK ENTENG DI DESA GULUREJO.....	71
A. Implementasi Kebijakan <i>Geblek Renteng</i> di Desa Gulurejo.....	71

B. Evaluasi Dampak Kebijakan <i>Geblek Renteng</i> di Desa Gulurejo	84
C. Analisis Implementasi Kebijakan Bela-Beli <i>Geblek Renteng</i> Kulon Progo di Gulurejo	95
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Table 1 Data dan Sumber Data Penelitian	33
Table 2 Daftar Fasilitas Desa tahun 2020.	43
Table 3 Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Gulurejo 2020.....	44
Table 4Data Jenis Pekerjaan Penduduk Gulurejo	45
Table 5 Data Kependudukan Menurut Agama.....	46
Table 6 Data Rumah Industri Batik	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn.....	30
Gambar 2 Peta Wilayah Gulurejo	40
Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gulurejo	42
Gambar 4 Baliho “Selamat Datang“ di Sentra Industri Batik Gulurejo.....	60
Gambar 5 Batik Hasil Karya Pembatik Desa Gulurejo.....	62
Gambar 6 Pameran dalam Galeri batik Desa Gulurejo.....	62
Gambar 7 Kang Girin pemilik Sembung Batik.....	64
Gambar 8 Galery Batik Sambayung	69
Gambar 9 Penulis bersama Bapak Purnomo Sambayung Batik	70
Gambar 10 Ibu Murti dan karyawannya yang sedang membatik di tempat produksi batik Sembung.....	72
Gambar 11 Bapak Purnomo yang sedang menyelesaikan motif batik baru buatannya.	73
Gambar 12 Galeri Batik Sembung.	79
Gambar 13 Gebyar Batik Kulon Progo 2018.....	81
Gambar 14 Kang Girin Sembung Batik menerima kunjungan murid MIN Ngestiharjo.	83
Gambar 15 Anak muda yang berkerja di bagian produksi Sembung Batik.....	85
Gambar 16. Motif asli <i>Geblek Renteng</i> yang dipasarkan Dinas Perindustrian, Kulon Progo.	88
Gambar 17 Modifikasi <i>Geblek Renteng</i> oleh Kreator Batik	88
Gambar 18 Ibu Murti bersama salah satu mahasiswa peserta <i>study tour</i> dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Musi Rawas.	89
Gambar 19 Kunjungan Kerja Anggota DPR RI kepada pekerja Industri Batik Gulurejo 2018	89
Gambar 20 Instalasi Pengolahan Limbah Batik Gulurejo.....	90
Gambar 21 Data Evaluasi Perkembangan Industri Batik Kulon Progo Pasca- <i>Geblek Renteng</i> 2012-2020.	91

Gambar 22 Batik *Geblek Renteng* beserta modifikasinya menjadi *wallpaper* di ruang tamu Disperindag Kulon Progo 2020..... 93

Gambar 23 Baju batik bermotif *Geblek Renteng* di Ruang Tamu Disperindag Kulon Progo, beserta kerajinan lokal lainnya. 94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul, “Studi Kebijakan Bela Beli Kulon Progo tentang Batik *Geblek Renteng* di Desa Gulurejo”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini maka diperlukan penjelasan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Studi Kebijakan

Istilah kebijakan lazim digunakan terkait dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).¹

Kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan *private* (individu atau lembaga swasta). Sedangkan kebijakan privat adalah

¹ Arum Sulistrini, “Kebijakan Publik; Pengertian dan ciri-ciri”, dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>. Diakses pada 09/02/2020. Puku 14.30 WIB.

tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga swasta dan tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain.²

Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini merujuk pada kebijakan yang bersifat publik (*public policy*). Dikarenakan kebijakan yang diteliti dilakukan secara umum, dipergunakan sebagai pedoman dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara.

2. Bela Beli Kulon Progo

Bela beli merupakan gerakan kemandirian yang pada awalnya diberi nama "Bela dan Beli Kulon Progo", gerakan ini dicetuskan oleh Bupati Kulon Progo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) pada pertengahan tahun 2012.³ Inti dari gerakan ini ialah menguasai pasar lokal dengan produk-produk lokal Kabupaten Kulon Progo, sepanjang potensi lokal mampu memproduksi. Menurut Hasto Wardoyo, gagasan Bela Beli muncul dari rasa prihatin mengingat Kulonprogo pada tahun 2012 menjadi kabupaten termiskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 24,6 persen. Gerakan Bela Beli telah mengakar di segala lapisan masyarakat, sehingga dalam kurun waktu 3 tahun sampai pada 2015, kemiskinan di Kulonprogo menurun sekitar 4 persen.⁴

² Budi Winarno, "Kebijakan Publik (Teori dan Proses)", (Jakarta: Media Presindo. 2008) hal.02-03..

³ MC, *Ikrar Gerakan Beli Kulon progo, Bela Kulon progo*, http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Ikrar-Gerakan-Beli-Kulon-Progo--Bela-Kulon-Progo_2673, (25 Maret 2013).

⁴ Wijaya Kusuma, *Hasto Bupati Bergelar Dokter yang Bikin Gerakan "Bela dan Beli KulonProgo"*, Kompas.Com, <http://regional.kompas.com/read/2015/12/16/15060851/Hasto.Bupati.Bergelar.Dokter.yang.Bikin.Gerakan.Bela.dan.Beli.Kulon.Progo>. (16 Desember 2015).

Kebijakan Bela Beli dideklarasikan pada tanggal 25 Maret 2013 di Alun-alun kota Wates. Kebijakan Bela Beli Kulonprogo merupakan kebijakan yang digunakan oleh Bupati Kulonprogo sebagai alat untuk mendorong agar masyarakat mau membela daerahnya sendiri dengan cara membeli produk yang diproduksi oleh masyarakat Kulonprogo. Dari pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa Kebijakan *Bela Beli* Kulonprogo adalah suatu kebijakan yang berupa pernyataan publik yaitu pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi dan dikutip oleh media massa dan disebarluaskan kepada masyarakat luas.⁵

Setidaknya terdapat 5 program dari kebijakan ini yang sudah berjalan. Program-program tersebut antara lain adalah, produksi Air-Ku, pengadaan ToMiRa, produksi Beras Daerah (Rasda), penggunaan batik hasil produksi daerah (*Geblek Renteng*), dan penggunaan batuan andesit daerah.⁶ Sejauh ini, tiga dari kelima program tersebut menjadi program unggulan dari kebijakan bela-beli Kulon Progo. Yaitu, produksi Air-Ku, Batik *Geblek Renteng*, dan ToMiRa.⁷

3. Batik *Geblek Renteng*

Batik *Geblek Renteng* adalah batik khas daerah yang Dari beberapa desain tersebut terpilih lah diproduksi massal oleh industry batik Kulon

⁵ Redaksi, "Bela Beli dan TomiRa Antarkan dr. Hasto Raih Bintang Jasa Utama". dalam https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/web/view_berita/4379/Bela-Beli-dan-TOMIRA-Antarkan-dr-Hasto-Raih-Bintang-Jasa-Utama. Diakses pada 21 januari 2020.

⁶ Muhammad Atsar Ashofi, "Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo dalam Perspektif Nomokrasi Islam", Jurnal In Right; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 06, No. 1, November 2016. hlm.66-68.

⁷ Ellson G. Budi Susilo, "Kajian Implementasi Bela-Beli Kulon Progo (Kasus; Airku, Batik Geblek Renteng, dan TomiRa)". Jurnal Bumi Indonesia, Volume 06, Nomor 03, Tahun 2017. hlm. 3.

Progo. "*Geblek Renteng*" sebagai nominator terbaik motif baru batik khas Kulon Progo, dan diumumkan secara resmi melalui berbagai media pada Minggu, 6 Mei 2012.⁸

Motif *Geblek Renteng* mengandung arti, geblek adalah makanan khas Kulonprogo yang terbuat dari ketela yang dibuat bulat-bulat. Sedang renteng berarti rentengan atau ikatan satu sama lain saat digoreng. Di antara motif geblek tersebut, ditorehkan lambang Binangun yang digambarkan sebagai kuncup bunga yang akan mekar, memiliki makna bahwa Kulon progo merupakan daerah yang sebentar lagi akan mekar menjadi permata indah dari pulau jawa. Di sampingnya terdapat motif buah manggis yang merupakan flora khas Kulon Progo. Ketiga motif tersebut dibuat dengan pola naik turun sebagai perlambang bahwa kenampakan alam di Kulon Progo yang sangat bervariasi, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, hingga dataran rendah dan pantai.⁹

Untuk bagian kain bawah, motif binangun sedikit dimodifikasi dengan menambahkan hiasan yang menyerupai sayap yang melambangkan bahwa sebentar lagi di Kabupaten Kulon Progo akan dibangun Bandar Udara yang diharapkan mampu meningkatkan kemajuan masyarakat Kulon Progo. Selain itu juga ada gambar burung kacer yang terbang ke atas, sebagaimana diketahui bahwa burung kacer merupakan salah satu

⁸ "Filosofi dan Sejarah Batik Motif Geblek Renteng dari Kulon Progo"
<https://www.motifbatik.web.id/2019/01/filosofi-dan-sejarah-batik-motif-geblek.html>. Diakses pada tanggal 02 Mei 2020.

⁹ "Filosofi dan Sejarah Batik Motif Geblek Renteng dari Kulon Progo"
<https://www.motifbatik.web.id/2019/01/filosofi-dan-sejarah-batik-motif-geblek.html>. Diakses pada tanggal 02 Mei 2020.

fauna identitas Kulon Progo. Sejak diberlakukan kebijakan bela-beli, motif *Geblek Renteng* diperkenalkan, disosialisasikan, diproduksi dan dipasarkan kepada masyarakat luas serta dijadikan motif khas asli Kulon Progo dan merupakan salah satu *icon* Kabupaten kulon Progo.¹⁰

4. Desa Gulurejo

Gulurejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Desa ini merupakan salah satu perintis usaha industri batik di Kabupaten Kulon Progo. Desa Gulurejo bersama 2 desa lainnya di Kecamatan Lendah, yakni Desa Ngentakrejo dan Desa Sidorejo, turut menjadi pelopor dari kebijakan bela beli *Geblek Renteng* Kulon Progo. Selain rumah produksi bagi industri batik, di Desa ini turut berdiri *showroom* maupun *gallery* batik. Saat ini, Desa Gulurejo merupakan salah satu desa wisata batik di Yogyakarta.¹¹

B. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material, dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketrentaman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial bagi diri, keluarga, dan masyarakat.¹²

¹⁰ “Filosofi dan Sejarah Batik Motif.....”. Diakses pada tanggal 02 Mei 2020.

¹¹ “Lendah, sentra Batik Yogyakarta”, dalam <https://lendah.kulonprogokab.go.id/detil/250/lendah-sentra-batik-yogyakarta>, diakses pada 5 februari 2020.

¹² Justita Dura, ” Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, SKebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam

Sedangkan yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.¹³

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek penting di dalam pemerintahan. Pemerintah berupaya sangat keras dengan berbagai program yang direncanakan atau sedang berjalan dan tidak lupa pula untuk dipantau dan di evaluasi seberapa efisien dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat baik dalam bidang pendidikan , ekonomi maupun kesehatan dalam menjalankan berbagai program guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Salah satunya tolok ukur meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari adanya perbaikan ekonomi. Tanda-tanda perbaikan ekonomi Indonesia salah satunya dapat dilihat pada Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di mana terdapat sejumlah terobosan untuk meningkatkan ekonomi daerahnya. Langkahnya dengan mengeluarkan kebijakan pro-rakyat yakni kebijakan Bela Beli Hasto Wardoyo. Hal ini merupakan manifesto dari berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah yaitu

<https://lp2m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2018/04/4.-JURNAL-JUSTITA-DURA-JIBEKA-VOL-10-NO-1-AGUSTUS-2016.pdf>, diakses 1 September 2018

¹³ Badan Pusat Statistik 2020, dalam <https://www.bps.go.id/publikation/2007/09/30/1a812bd2a8620ea5033180d9/indikator-kesejahteraan-rakyat-2006.html>, diakses 20 Januari 2020.

¹⁴ Sugiarto, Eddy. Teori Kesejahteraan Sosial dan Pengukurannya. Jurnal Eksekutif volume 4. Nomor 2. Tahun 2012. Universitas Sam Ratulangi.

kabupaten/kota dan provinsi telah diberi kewenangan secara otonom untuk mengelola daerahnya dalam bidang pemerintahan.¹⁵

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Kulon Progo merupakan Kabupaten di DIY yang menduduki peringkat dua terakhir dalam kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, pada tahun 2011 angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo adalah 23,62%, angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta 16,08% dan angka kemiskinan nasional sebesar 12,49%. Pada tahun 2012 angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo menurun menjadi 23,22% akan tetapi angka tersebut tetap lebih tinggi dibanding rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta 15,88% dan angka kemiskinan nasional sebesar 11,66%.¹⁶

Menurut Badan Pusat Statistik Yogyakarta Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta 2014-2015, jumlah total penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo mencapai 84,67 (20,64%) mengalami penurunan dari Tahun 2014 dimana angka kemiskinan pada tahun 2014 sejumlah 86,50.2 Pada setiap tahun dari tahun 2011 hingga 2015 angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo terus menurun dengan stabil. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo ini adalah salah satu hasil dari upaya pengentasan

¹⁵ Ellson G. Budi Susilo, "Kajian Implementasi Bela-Beli Kulon Progo (Kasus; Airku, Batik Geblek Renteng, dan TomiRa)". Jurnal Bumi Indonesia, Volume 06, Nomor 03, Tahun 2017.

¹⁶ Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kulon Progo. "Panduan Penanggulangan Kemiskinan", 2014. Kulon Progo. (TKPK, 2014)

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang diharapkan dapat terus menurun.¹⁷

Di sisi lain kemiskinan bukan hanya menjadi masalah pemerintah saja. Pemecahan masalah kemiskinan tidak dapat lagi dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan terpusat dan berjangka pendek. Melainkan memerlukan pendekatan yang terpadu, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan banyak pihak. Kemiskinan muncul karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.¹⁸

Melihat realitas tersebut, Bupati Kulon Progo, Dr. Hasto Wardoyo, Sp.oG(K) bersama forum Komunikasi Informatika Daerah (Forkompinda), dan ribuan masyarakat mendeklarasikan Ikrar gerakan “Bela-Beli Kulon Progo” di Alun-alun Wates pada tanggal 25 Maret 2013.¹⁹ Lahirnya semangat gerakan Bela-Beli Kulon Progo sebagai bentuk usaha penanggulangan kemiskinan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Gerakan “Bela-Beli Kulon Progo” merupakan gerakan sosial yang dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan berlandaskan aspek pemberdayaan masyarakat. Menurut Media Center Kabupaten

¹⁷ Felix Arberd Nur Kristianto, “Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan “Bela-Beli Kulon Progo””. Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Vol.12, no. 1, 19-28, Mei 2015.

¹⁸ Prof. Dr. Susetiawan, ” Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme”. dalam <https://pspk.ugm.ac.id/2009/07/15/pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat-sebuah-ketidakterdayaan-para-pihak-melawan-konstruksi-neoliberalisme/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

¹⁹ Bagus Kurniawan, “ Bela Beli Kulon Progo“ Spirit dan Sukses Bupati Hasto Angkat Produk Lokal,. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-3102031/bela-beli-kulonprogo-spirit-dan-sukses-bupati-hasto-angkat-produk-lokal> diakses pada 20 Januari 2020.

Kulon Progo, Gerakan ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membeli produk asli kabupaten kulon Progo sebagai bentuk membela kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.²⁰

Kebijakan Bela Beli Kulon Progo merupakan kebijakan untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progo dengan mengutamakan produk sendiri dibandingkan produk asing. Sementara itu, salah satu programnya yaitu *One Village One Sister Company* adalah kerjasama antara desa dengan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program *One Village One Sister Company* ini menggandeng 17 perusahaan swasta, BUMN dan BUMD untuk menjadi orang tua asuh dari desa-desa di Kulon Progo. Perusahaan yang menjadi orang tua asuh diharapkan dapat membina desa-desa yang menjadi asuhannya sehingga kesejahteraan di desa itu meningkat dan keluar dari angka kemiskinan.²¹

Cara yang dilakukan dengan melipatgandakan kelompok wirausaha yang terdiri dari orang miskin dalam Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB). Kemudian juga dari kepala daerahnya atau Bupati mendapatkan penghargaan LOS Award kategori Kepala Daerah diberikan atas upaya Pemkab menegakkan etika usaha sektor swasta di DIY. Pada kategori ini, penilaian dilakukan terhadap sejauh mana Pemkab memberikan kendali

²⁰Felix Arberd Nur Kristianto, "Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan "Bela-Beli Kulon Progo"". Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Vol.12, no. 1, 19-28, Mei 2015.

²¹ Much. Kaotsar Asshofi, "Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto" IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia , Vol. 6, No. 1, November 2016

terhadap etika dalam berusaha antara investor, penanam modal dan pengusaha di Kulon Progo.²²

Konsep ini dicetuskan pada tahun 2013 dan langsung di sosialisasikan secara masif di seluruh wilayah Kulon Progo. Kebijakan Bela Beli Kulon Progo merupakan kebijakan untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progon dengan mengutamakan produk sendiri dibandingkan produk asing. Banyak kebijakan yang diluncurkan sebagai bentuk pembelaan terhadap ekonomi daerahnya.²³

Program kebijakan Bela Beli Kulon Progo ada beberapa produk unggulan diantaranya yakni AirKU, Tomira serta Batik *Geblek Renteng*. Berawal dari melimpahnya air bersih di wilayah Kulon Progo serta banyaknya masyarakat Kulon Progo yang mengkonsumsi air bersih dari produk luar, maka sesuai visi dari bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo yakni bela dan beli Kulon Progo. AirKU pun menjadi inovasi baru untuk mencukupi kebutuhan air bersih daerah Kulon Progo. Dengan harga yang relatif lebih murah daripada produk lain, AirKU memiliki pangsa pasar yang potensial di daerah Kulon Progo.²⁴

Produk selanjutnya adalah Toko Milik Rakyat atau sering disebut juga (Tomira), merupakan toko modern hasil kemitraan antara koperasi

²² Redaksi, "Bela Beli dan TomiRa Antarkan dr. Hasto Raih Bintang Jasa Utama". dalam https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/web/view_berita/4379/Bela-Beli-dan-TOMIRA-Antarkan-dr-Hasto-Raih-Bintang-Jasa-Utama. Diakses pada 21 januari 2020.

²³ Much. Kaotsar Asshofi: Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto... IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo dalam Perspektif Nomokrasi Islam Vol. 6, No. 1, November 2016

²⁴ Ellson G. Budi Susilo, "Kajian Implementasi Bela-Beli Kulon Progo (Kasus; Airku, Batik Geblek Renteng, dan TomiRa)". Jurnal Bumi Indonesia, Volume 06, Nomor 03, Tahun 2017.

dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Alfamart) serta koperasi dengan PT Indomarco Prismatama (Indomaret). Kemitraan antara koperasi dengan PT Sumber Alfaria Trijaya menggunakan sistem akuisisi, yaitu koperasi mengambil alih atau membeli toko Alfamart, kemudian kemitraan antara koperasi dengan PT Indomarco Prismatama menggunakan sistem penyertaan modal, yaitu koperasi mempunyai lahan kemudian pihak PT Indomarco Prismatama mendirikan bangunan Tomira.²⁵

Di dalam Bela Beli Kulon Progo terdapat program *Geblek Renteng*, yang motifnya di ambil dari makanan khas Kabupaten Kulon Progo yaitu *Geblek Renteng*. Diantaranya mewajibkan pelajar dan PNS di Kulon Progo mengenakan seragam batik gebleg renteng, batik khas Kulon Progo, pada hari tertentu. Dengan jumlah 80.000 pelajar dan 8.000 PNS, kebijakan ini mampu mendongkrak industri batik lokal. Sentra kerajinan batik tumbuh pesat, dari cuma dua menjadi lima puluh, dan program ini juga telah menurunkan angka kemiskinan dari 22,54 persen pada 2013 menjadi 16,74 persen pada 2014 dan pada akhir 2015 tercatat angka kemiskinan tinggal 52.331 jiwa atau 12%.²⁶

Selain dikenakan sebagai seragam, batik juga kerap digunakan sebagai pakaian acara formal maupun non formal sekaligus. Hal ini membuat produsen batik meningkat, terutama di Kecamatan Lendah.

²⁵ Ratna Safitri, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat (ToMiRa) DI KABUPATEN KULON PROGO”, Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 1

²⁶ Redaksi, “Entaskan Kemiskinan dengan Bela Beli Kulon Progo”, dalam <https://beliindonesia.com/entaskan-kemiskinan-dengan-bela-dan-beli-Kulon-Progo/> diakses 1 Januari 2020

Daerah yang mulanya hanya berupa lahan kering dan menjadi penyuplai tetap para transmigran pekerja kasar di kota-kota besar mulai semarak akan kegiatan ekonomi produktif batik tersebut. Pada mulanya hanya terdapat 14 industri batik yang terus berkembang tiap tahunnya. Dalam data terakhir, tercatat setidaknya terdapat 24 sentra industri batik tersebar di berbagai desa yang mampu menyerap 100 sampai 200 jumlah tenaga kerja di setiap unitnya.²⁷

Karena *Geblek Renteng*, batik corak lain ikut terdongkrak. Selain Batik Pulo, Sembung Batik punya batik abstrak, cap kombinasi dan batik tulis pun semakin mendapatkan tempat di pasar batik. Terutama setiap hari atau masa liburan, omset penjualan rata-rata mengalami kenaikan hingga 30 persen. Separuh produksinya corak *Geblek Renteng*, separuh lagi corak lainnya yang sudah terkenal. Hal tersebut menjadikan Kampung-kampung batik di Lendah tak pernah sepi pembeli. Tak cuma pembeli, banyak juga yang mampir ke sana sengaja hanya untuk wisata menyaksikan orang membatik. Warga di sana sangat ramah memberi petunjuk dan arah tempat-tempat kelompok pembatik dan menimbulkan kesan betapa bangganya warga pada kampung mereka.²⁸

Usaha partisipasi warga yang aktif tersebut ditanggapi dengan baik oleh pemerintahan Kulon Progo. Kecamatan Lendah sekarang dikenal

²⁷ “Geliat Batik Lendah Kulon Progo; dari Para Buruh Menjadi para Boss..”, dalam <https://lendah.kulonprogokab.go.id/detil/543/geliat-batik-lendah-kulon-progo-dari-buruh-menjadi-para-boss>, diakses pada 5 februari 2020.

²⁸ Dani Julius Zebua, “Kisah Kang Girin, dari Buruh hingga Bawa Desanya Jadi Kampung Batik Terkenal”, dalam <https://regional.kompas.com/read/2018/03/24/10485821/kisah-kang-girin-dari-buruh-hingga-bawa-desanya-jadi-kampung-batik-terkenal?page=all>. Diakses pada 5 februari 2020.

sebagai kawasan pariwisata batik yang terus diperkenalkan dan dipromosikan dengan baik oleh Dinas Pariwisata Kulon Progo.²⁹ Selain hal tersebut, pegiat industri batik daerah Lendah pun turut mendirikan galeri-galeri batik, serta acara kebudayaan yang menjadikan batik sebagai tema utamanya.³⁰

Kecamatan Lendah sendiri memiliki kurang lebih 20 pengrajin batik baik dari UMKM batik yang baru berdiri sampai yang sudah lama pendiriannya. Pengrajin batik yang berada di wilayah ini tidak semuanya memiliki galeri atau *showroom* sendiri. Hanya beberapa dari mereka yang memiliki modal yang cukup besar dan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang memiliki galeri atau *showroom*. Pusat industri batik di Kecamatan Lendah terletak di 3 desa, yakni: Desa Sidorejo, Desa Gulurejo, Desa Ngentakrejo.³¹

Diantara ketiga desa tersebut, Desa Gulurejo merupakan salah satu desa rintisan wisata batik yang ditunjuk langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.³² Terdapat 9 industri batik yang berkembang di wilayah tersebut. Diantaranya adalah Faras Batik, Sembung Batik, Yoga

²⁹ “Lendah, sentra Batik Yogyakarta”, dalam <https://lendah.kulonprogokab.go.id/detil/250/lendah-sentra-batik-yogyakarta>, diakses pada 5 februari 2020.

³⁰ Harun Susanto, “Industri Batik Berkembang Baik di Kulon Progo”, dalam http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/579146/ekonomi/industri_batik_berkembang_baik_di_kulon_progo.html, diakses pada 5 februari 2020.

³¹ Data industri, https://bbkb.kemenperin.go.id/index.php/page/show/data_industri diakses pada tanggal 7 April 2020 puku 19.26 wib.

³² “Desa Sembungan Rintisan Desa Wisata Batik Jogja”, lih. <https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/43--desa-sembugan-rintisan-desa-wisata-batik-di-kulon-progo->, diakses pada tanggal 7 April 2020 pukul 19.40 wib

Batik, dll. Ketiga industri perintis yang disebutkan di atas juga merupakan pendiri kelompok Koperasi Industri Batik di Desa Gulurejo.

Selayaknya sebuah Industri yang melibatkan banyak orang serta kepentingan di dalamnya, perjalanan para pembatik di Desa Gulurejo tidak selalu lancar. Terdapat beberapa problem yang menghambat serta menjadi tantangan langsung bagi jalannya kebijakan bela-beli *Geblek Renteng* ini. Masalah normal semisal perubahan cuaca ekstrem, penguasaan teknologi terbaru, persaingan industri batik dari luar daerah, sampai problem kompleks seperti pembuangan Limbah Industri yang menuai kontroversi bagi pekerja lain di luar Industri Batik. Serta kemungkinan hambatan di luar dugaan semisal pandemi corona (COVID-19).

Melihat data di atas, tentang kebijakan Bela Beli Hasto Wardoyo. Penulis menjadi tertarik untuk meneliti kebijakan tersebut karena penulis ingin melihat apakah kebijakan Bela Beli Hasto Wardoyo merupakan strategi yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo terutama dalam produk Batik *Geblek Renteng* di daerah Gulurejo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penyusun membatasi permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Bela Beli *Geblek Renteng* di Desa Gulurejo?

2. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Bela Beli *Geblek Renteng* di Desa Gulurejo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan implementasi Kebijakan Bela Beli *Geblek Renteng* Kulon Progo.
2. Untuk menjelaskan dampak dan evaluasi Kebijakan Bela Beli *Geblek Renteng* Kulon Progo terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gulurejo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai referensi dalam kaitan pengembangan keilmuan sosial pada umumnya dan kebijakan publik pada khususnya,
- b. Sebagai referensi dalam kaitan pengembangan keilmuan ekonomi pada umumnya,
Sebagai kontribusi keilmuan mengenai kebijakan sosial kemasyarakatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai bahan untuk memperdalam teori-teori terkait kebijakan publik dan ekonomi di pemerintahan,
 - 2) Diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan telaah awal bagi akademisi guna memahami kontribusi penguasaan kebijakan sosial,
 - 3) Perwujudan mengembangkan pemikiran berdasarkan pada relasi antara efektifitas kebijakan dalam pemerintahan.
- b. Bagi Masyarakat
- 1) Sebagai materi untuk memahami implementasi kebijakan bagi pengembangan keilmuan pemerintahan,
 - 2) Sumbangsih manfaat bagi peningkatan daya kritis masyarakat dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah.
- c. Bagi Pemerintah
- Dapat memberikan masukan bagi pemerintah atau kepala pemerintahan agar dapat membuat kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian yang penulis temukan.

1. Penelitian berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Loloda (Suatu Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat)”. Penelitian ini ditulis oleh Klemens Patty dengan pokok masalah tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten tersebut dalam menanggulangi kesenjangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk metode penelitian kebijakan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan/ menjelaskan apa yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis dan diberikan pertanyaan serta solusi. Kemudian yang digunakan sebagai pisau analisa adalah “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan jalan guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Temuan penelitian dari kebijakan daerah tersebut sudah tepat yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala diantaranya anggaran, material bangunan, transportasi yang sulit, dan harga sembako yang tinggi. Pada prinsipnya pembangunan jalan merupakan salah satu sarana umum yang sangat penting untuk mempercepat / meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Letak perbedaan penelitian terletak pada lokasi dan kajian masalah yang mana penelitian sebelumnya meneliti tentang

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kesenjangan program demi mewujudkan kesejahteraan daerah sedangkan penelitian yang akan ditulis lebih spesifik tentang kebijakan yang digunakan oleh Bupati Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.³³

2. Penelitian Felix Arberd Nur Kristianto dengan mengusung judul “Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo”. Jurnal ini memfokuskan penelitian pada partisipasi masyarakat Kalibawang dalam gerakan Bela Beli Kulon Progo. Metode yang digunakan dengan metode penelitian lapangan (field reasearch). Ulasan hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Kalibawang sudah ada namun kurang optimal. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis tulis ialah terletak pada kajiannya. Peneliti sebelumnya meneliti tentang partisipasi masyarakat Kalibawang Kulon Progo, sedangkan yang akan penulis teliti mengenai dampak kebijakan Bela Beli itu sendiri.³⁴
3. Penelitian terakhir yang berjudul “Manajemen Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Manajemen Komunikasi Program Bela Beli Kulon Progo) di Kulon Progo, Yogyakarta)” tesis yang disusun oleh Ria harlinawati isinya

³³ Klemens Patty. “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Loloda (Suatu Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat)” dalam Jurnal Eksekutif Vol. 01 No. 04 Tahun 2015 (Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2015).

³⁴ Felix Arberd Nur Kristianto, “Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan “Bela-Beli Kulon Progo””. Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Vol.12, no. 1, 19-28, Mei 2015.

menjelaskan tentang bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mensukseskan program Bela Beli Hasto Wardoyo . Dalam hasil penelitiannya diperoleh temuan komunikasi pemerintah Kulon Progo menerapkan metode manajemen komunikasi melalui empat langkah yakni mendefinisikan masalah, perencanaan komunikasi, aksi dan komunikasi, serta evaluasi komunikasi dalam sosialisasi program Bela Beli Hasto Wardoyo meskipun belum maksimal, sehingga hasil yang didapathanya maksimal pada efek kognitif, sedangkan efek afektif dan konatif masih jauh dari maksimal. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah terletak pada kajian masalahnya. Peneliti sebelumnya memfokuskan pada komunikasi dalam mensukseskan kebijakan Bela Beli Hasto Wardoyo. Namun penelitian yang akan diteliti oleh penulis meneliti tentang proses kebijakan tersebut dibuat hingga dampaknya bagi masyarakat.³⁵

Dari berbagai penjelasan penelitian di atas, gambaran yang dapat diambil yaitu program Bela Beli Kulon Progo memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Dalam hal ini, program Bela Beli Kulon Progo mendapatkan apresiasi dari berbagai daerah.

³⁵ Ria harlinawati. “Manajemen Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Manajemen Komunikasi Program Bela Beli Kulon Progo) di Kulon Progo, Yogyakarta)” Tesis S2 Ilmu Politik/Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. (Yogyakarta : UGM. 2014)

Namun secara khusus, produk batik *Geblek Renteng* yang merupakan salah satu bagian dari program unggulan tersebut belum dibahas sebagai objek penelitian secara spesifik. Hal tersebut menjadi perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang hendak penulis ajukan.

G. Landasan Teori

Landasan teori digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis), dan penyusunan instrument penelitian.

1. Konsep Kebijakan

a. Definisi Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.³⁶

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu

³⁶ Lihat, <https://typoonline.com/kbbi/kebijakan>, diakses pada 0904/2020. Pukul 13.30 WIB.

lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan (*challenge*) dan kesempatan (*opportunity*) terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.³⁷

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;

³⁷ Leo Agustino, “*Dasar-dasar Kebijakan Publik*”, (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm. 07.

- Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
- Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.³⁸

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam definisi yang mashur dari Dye adalah *whatever goverments choose to do or not to do*. Makanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Jika anda melihat banyak jalan berlubang, jembatan rusak atau sekolah rubuh kemudian anda mengira bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa, maka “diamnya” pemerintah itu menurut Dye adalah kebijakan.³⁹

Hogwood dan Gunn dalam Parsons menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern, yaitu:

- Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas;

³⁸ Solichin Wahab, “Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebikjaksanaan Negara”, (Jakarta:,Bumi Aksara, 2008), hlm. 40-50.

³⁹ Suharno, “Dasar-dasar Kebijakan Publik”, (Yogyakarta: UNY Press. 2010) hal.03-04.

- Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan;
- Sebagai proposal spesifik;
- Sebagai keputusan pemerintah;
- Sebagai otorisasi formal;
- Sebagai sebuah program;
- Sebagai output;
- Sebagai “hasil” (outcome);
- Sebagai teori dan model;
- sebagai sebuah proses.⁴⁰

Sementara itu Lasswell menginginkan ilmu kebijakan publik mencakup 1) metode penelitian proses kebijakan, 2) hasil dari studi kebijakan, 3) hasil temuan penelitian yang memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan intelegensi era kita sekarang. Lasswell juga menggerakkan dan mendorong agar analisis kebijakan menjadi lebih kreatif dalam mengidentifikasi masalah-masalah kebijakan. Analisis kebijakan harus menunjukkan rasionalitas dan kreatifitas dalam menciptakan alternatif-alternatif kebijakan. Dengan demikian analisis kebijakan harus memiliki banyak metode dan senjata untuk menciptakan kebijakan-kebijakan

⁴⁰ Wayne Parsons, *“Public Policy; Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan”*, (Jakarta: Kencana. 2006) hal. 15.

sebagai solusi masalah publik. Karena itulah menurut Laswell, ilmu kebijakan adalah harus kontekstual, multimetode dan berorientasi pada masalah.⁴¹

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (Publik Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”.⁴²

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.⁴³

c. Tahap-tahap Kebijakan

Kebijakan publik dapat lebih mudah di pahami jika di kaji tahap demi tahap. Inilah yang menjadikan kebijakan publik menjadi “penuh warna”, dan

⁴¹ Wayne Parsons, *“Public Policy; Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan”*, (Jakarta: Kencana. 2006) hal. 20.

⁴² William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: UGM Press. 2003 cet. II) hal. 132

⁴³ William N. Dunn, *Pengantar*, (Yogyakarta: UGM Press. 2003 cet. II) hal. 135-136.

kajiannya amat dinamis. Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Di sini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.

Menurut Budi Winarno tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- *Tahap Penyusunan Agenda*

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

- *Tahap Formulasi Kebijakan*

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/ policy options*) yang ada. Sama

halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “ bermain “ untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

- *Tahap Adopsi Kebijakan*

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

- *Tahap Implementasi Kebijakan*

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat

dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh para pelaksana.

- *Tahap Evaluasi Kebijakan*

Pada tahap ini kebijakan publik yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.⁴⁴

2. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Model implementasi yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah model yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn. Model ini lebih berada pada model *top-bottom* atau atas ke bawah dan mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara *linier* antara kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dapat diambil kesimpulan bahwa Van Meter dan Van Horn memperlihatkan hubungan yang saling mempengaruhi antar faktor. Dalam model ini Van meter dan Van Horn menyebutkan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kebijakan, yaitu:

⁴⁴ Budi Winarno, "Kebijakan Publik (Teori dan Proses)", (Jakarta: Media Presindo. 2008) hal.35-37.

- Standar dan tujuan;
- Sumber Daya;
- Karakteristik dari agen pelaksana/implementor;
- Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi;
- Kondisi ekonomi, sosial, dan politik;
- Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.⁴⁵

Dari pembagian diatas dapat dijelaskan bahwa suatu kebijakan publik harus mempunyai standar dan tujuan yang jelas dan terukur sehingga sasaran dari kebijakan publik tersebut dapat dicapai. Kemudian kebijakan publik tidak akan dapat tercapai apabila tidak adanya sumberdaya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya ekonomi dan juga sumber daya non manusia lainnya dikarenakan kebijakan publik tidak akan terlaksana apabila tidak ada sumber daya manusia yang menjalankan dan sumberdaya lain yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan publik tersebut. Salah satu contohnya adalah suatu kebijakan tidak akan terlaksana apabila tidak ada sumber daya ekonomi atau dana yang pengaruhnya tidak kalah besarnya dengan manusia dan sumber daya alam dalam pelaksanaan kebijakan.

Kemudian banyak implementasi kebijakan membutuhkan aktivitas implementasi dan hubungan yang baik antar organisasi atau instansi terkait demi keberhasilan program kebijakan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi dan koordinasi merupakan inti dari aktivitas

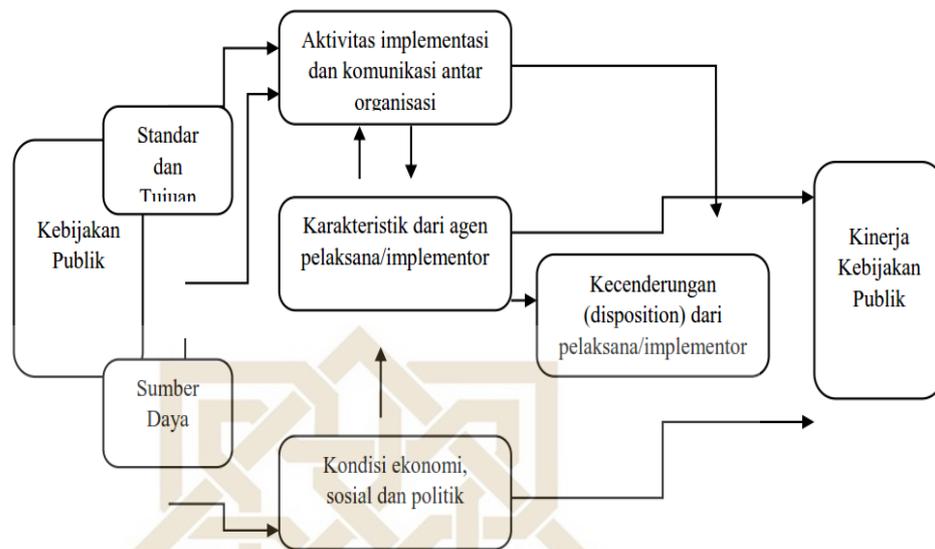
⁴⁵ Solichin Wahab, "Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebikjasanaan Negara", (Jakarta:,Bumi Aksara, 1991) hal. 42.

implementasi antar instansi. Karakteristik agen pelaksana atau implementor sangat mempengaruhi implementasi implementasi dari suatu program kebijakan. Menurut Subarsono keberhasilan program kebijakan dapat dilihat dari karakteristik implementornya yang mana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian kecenderungan dari pelaksana (disposition implementor), disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu : (a) respon implementor, ketertarikan atau kemauan implementor untuk melaksanakan program kebijakan publik; (b) kondisi, pemahaman terhadap kebijakan publik; dan (c) intens disposisi implementor, prefensi nilai yang dimiliki kebijakan publik tersebut.⁴⁶

Terakhir dari teori Van Meter dan Van Horn menurut Subarsono, kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi merupakan variabel yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan juga apakah elite politik mendukung atau tidak implementasi kebijakan tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Solichin Wahab, "Analisis.....", (Jakarta:,Bumi Aksara, 1991) hal. 47-48.

⁴⁷ Solichin Wahab, "Analisis.....", (Jakarta:,Bumi Aksara, 1991) hal. 48.



Gambar 1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik, James P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Sehingga evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalannya dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁸

Menurut Briant & White evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya

⁴⁸ Budi Winarno, "Kebijakan Publik; Teori dan Proses.", Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Media Pressindo. 2004) hlm. 165.

mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant & White di atas, mengarahkan penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan.⁴⁹

Pengertian evaluasi oleh Rossi & Freeman memberitahukan bahwa evaluasi program harus dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian evaluasi yaitu: desain dan konseptualisasi program, implementasi program (monitoring dan akuntabilitas) serta kegunaan program (dampak dan efisiensi).Selanjutnya, menurut Rossi & Freeman bahwa tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan adalah tersedianya tujuan (goals) dan kriteria (criteria). Goals merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa goals ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan.⁵⁰

Menurut Samodra Wibawa, evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk

⁴⁹ Samodra Wibawa, dkk., "*Evaluasi Kebijakan Publik.*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994) hlm.63.

⁵⁰ Ibid hlm.63.

kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain.⁵¹

Berdasarkan penjelasan evaluasi oleh Samodra Wibawa di atas, informasi yang didapat dari evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan bahkan juga bisa memberikan informasi faktor-faktor yang dapat dimanipulasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menghindari program yang merugikan masyarakat dan menentukan keberlanjutan program di masa mendatang. Jika hasil dari evaluasi program menunjukkan bahwa dalam program tersebut ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan perubahan, maka para pengambil keputusan sebaiknya harus menanggapinya dengan serius. Artinya mereka harus mempunyai ide-ide baru guna memperbaiki programnya, sehingga program tersebut dapat terhindar dari kegagalan dan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁵²

Mengacu pada kerangka teori diatas, maka penelitian ini merupakan studi kritis terhadap kebijakan Bela Beli Kulon Progo mengenai Batik *Geblek Renteng* yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo. Namun, dalam tahap implementasi dan evaluasi kebijakan, penulis memfokuskan penelitian ini di salah satu desa wisata Batik, yaitu Desa Gulurejo Kecamatan Lendah.

⁵¹ Ibid hlm.13-14

⁵² Ibid hlm.13-14.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. Alasannya adalah:

- a. Desa Gulurejo merupakan desa yang memproduksi Batik *Geblek Renteng* terbesar di Kabupaten Kulon Progo.
- b. Desa Gulurejo merupakan desa wisata batik dikarenakan banyaknya jumlah produsen sekaligus pemilik galeri.
- c. Desa Gulurejo merupakan produsen batik yang sudah terkenal hingga ke daerah luar bahkan tidak jarang wisatawan mengunjungi butik tersebut.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi (informan) yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut, maka subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan, ESDM, dan Produsen Batik *Geblek Renteng* yang berada di Desa Gulurejo, konsumen, dan masyarakat sekitar.

3. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang akan digali dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Table 1 Data dan Sumber Data Penelitian

No	Masalah yang Diajukan	Data yang Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
1	Konsep kebijakan Bela Beli Kulon Progo	Mengetahui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait program bela beli kulon progo	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	Dinas Perindustrian Perdagangan ESDM ,produsen batik <i>Geblek Renteng</i> .
2	Implementasi kebijakan bela beli kulon progo terhadap batik <i>Geblek Renteng</i> untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Mengetahui implementasi kebijakan bela beli Kulon Progo terhadap batik <i>Geblek Renteng</i> untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	Masyarakat kulon progokhususnya daerah Desa Gulurejo, Dinas Perindustrian perdagangan, dan konsumen.

4. Teknik Validitas Data

Dalam mengukur keabsahan data, terdapat beberapa teknik pemeriksaan tertentu yang termasuk ke dalam kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Beberapa teknik tersebut diantaranya adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keikutsertaan, observasi secara penuh.

Keikutsertaan peneliti ditentukan saat pengumpulan data. Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal tersebut penting, artinya karena penelitian kualitatif berorientasi pada situasisehingga dengan perpanjangan keikutsertaan dapat memastikan apakah kontek itu dipahami dan dihayati. Disamping itu membangun kepercayaan antara subjek dan peneliti memerlukan waktu yang cukup lama.

Beberapa langkah di atas dilakukan oleh peneliti dalam melakukan keabsahan data yang akan disajikan dalam penelitian ini.

5. Penentuan Informan

Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menentukan informan dengan memilih kriteria tertentu berdasarkan maksud dan tujuan Informan tersebut kami wawancarai untuk memperoleh informasi yang akurat dari sumbernya, sehingga dapat membantu jalannya penelitian ini. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu:

- Pihak yang membuat kebijakan Bela Beli Kulon Progo
- Produsen Batik *Geblek Renteng* di Desa Gulurejo
 - Konsumen Batik *Geblek Renteng*
 - Masyarakat sekitar desa Gulurejo

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh merupakan data yang berwujud kalimat-kalimat verbal danbiasanya merupakan

dokumen pribadi, catatan laporan, upagara atau cerita responden dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Sehingga penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan penuh yang hanya melakukan pengamatan saja dan tidak terlibat dalam objek kajian penelitian.

b. Wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah: metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Metode wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat informatif secara lisan dari sumber data yang akan digunakan. Bentuk interview yang penulis gunakan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kepada sumber data untuk memberikan jawaban berupa keterangan-keterangan dan cerita-cerita, ini dipakai guna memperoleh data tentang Kebijakan Bela-Beli Hasto Wardoyo dan Batik *Geblek Renteng*.

c. Dokumentasi, metode ini diperlukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan persoalan penelitian, juga digunakan untuk melengkapi data yang belum diperoleh melalui metode interview dan observasi. Adapun metode dokumentasi ini diperlukan untuk mengumpulkan data seperti data pengusaha, yang berkaitan dengan Kebijakan Bela-Beli Kulon Progo.

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Data yang dikumpulkan tersebut dengan bentuk data kualitatif, oleh karena itu analisa yang digunakan adalah deskriptif maksudnya menyajikan penjelasan data yang diperoleh yang selanjutnya disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan yang menggunakan bahasa dan logika sebagai analisisnya. Setelah dianalisis data yang telah dideskripsikan dan telah menjadi bagian bagian konseptual tersebut maka diambil pokok permasalahannya, kemudian dijadikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan adalah rumusan proposisi yang dibuat oleh peneliti yang berkaitan dengan prinsip logika sehingga menjadi sebuah temuan penelitian. Kemudian datanya dikaji secara berulang-ulang, dan data yang sudah terbentuk tersebut dikelompokkan sesuai dengan proposisi yang telah dirumuskan.

Dari analisis data di atas dapat menghasilkan sebuah analisis dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis agar dapat menjawab rumusan masalah yang peneliti buat.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama dijelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum wilayah Gulurejo, profil Desa dan menjelaskan mengenai latar belakang, serta konsep kebijakan Bela Beli Kulon Progo secara keseluruhan dan kebijakan *Geblek Renteng* secara khusus.

Bab ketiga berisi tentang analisis penulis akan hasil temuan dengan berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah. Yaitu proses implementasi dan evaluasi dari kebijakan Bela-beli Batik *Geblek Renteng* terhadap kesejahteraan masyarakat Gulurejo.

Bab penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti dengan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Bela-Beli *Geblek Renteng* Kulon Progo di Desa Gulurejo penulis menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut

1. Kebijakan ini berjalan efektif dalam mencapai tujuannya dikarenakan tersedianya faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan antara lain berupa tersedianya sumber daya manusia yang telah terbiasa dengan tradisi batik di Desa Gulurejo. Sehingga pemberian bantuan sumber daya produksi maupun pelatihan keterampilan oleh Pemerintah Kabupaten dapat dimaksimalkan potensinya dengan baik. Faktor lain pendukung adalah itu keaktifan para pengusaha batik dalam inovasi motif kreasi serta perluasan area pemasarannya sendiri sembari bersaing secara sehat antar sesama pengusaha batik. Faktor inilah yang menjadikan pemerintah baik di tingkat desa, maupun di Kabupaten bertindak sebagai fasilitator program atau sebatas penengah jika terjadi permasalahan antar sesama pembatik.
2. Walaupun efektif, kebijakan ini tidak bebas kritik. Kedekatan pemerintah kabupaten dengan rumah batik tertentu berpeluang memicu konflik yang tidak perlu antar sesama pembatik. Selain itu, permasalahan lingkungan hidup terkait limbah batik yang butuh

perhatian secara seksama dari semua pihak terlibat sehingga dapat terselesaikan dengan segera. Dan terakhir tidak adanya kebijakan antisipasi dari pemerintah dalam situasi pandemic ataupun bencana lainnya yang mengakibatkan pada melemahnya kegiatan ekonomi dari para pelaku industri ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut

- Pemerintah Kabupaten perlu untuk melakukan evaluasi secara komprehensif kepada pembatik dan mengklasifikan mereka ke dalam kategori yang lebih jelas. Sehingga pengimplementasian kebijakan melalui pemberian modal, pelatihan, maupun kerja sama dengan institusi lain menjadi tepat sasaran dan merata.
- Masalah lingkungan hidup limbah batik harus segera diselesaikan dengan baik oleh semua pihak terlibat sehingga tidak merugikan bagi segmen masyarakat yang lain.
- Pemerintah perlu dengan segera merumuskan kebijakan antisipasi terhadap kejadian luar biasa seperti pandemic, maupun bencana alam lainnya sehingga kegiatan ekonomi dan industri masyarakat tetap berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Skripsi dan Jurnal

- Eddy Sugiarto. *Teori Kesejahteraan Sosial dan Pengukurannya*. Jurnal Eksekutif volume 4. Nomor 2. Tahun 2012. (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2012).
- Ellson G. Budi Susilo, "Kajian Implementasi Bela-Beli Kulon Progo (Kasus; Airku, Batik Geblek Renteng, dan ToMiRa)". Jurnal Bumi Indonesia, Volume 06, Nomor 03, Tahun 2017. (Yogyakarta ; Universitas Gajah Mada, 2017)
- Felix Arberd Nur Kristianto, "Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan "Bela-Beli Kulon Progo"". Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Vol.12, no. 1, 19-28, Mei 2015 (Yogyakarta; Universitas Negeri Yogyakarta. 2015)
- Much. Kaotsar Asshofi, "Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto" IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia , Vol. 6, No. 1, November 2016 (Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga 2016)
- Ratna Safitri,: *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat (ToMiRa) di Kabupaten Kulon Progo*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2017).
- Muhammad Atsar Ashofi, "Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo dalam Perspektif Nomokrasi Islam", Jurnal In Right; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 06, No. 1, November 2016.

- Yosi Wulandar, ” *Upaya Pengembangan Pengrajin Batik Di Desa Wisata Batik Gulurejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo*” Skripsi. (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 2017).
- Rahadiyan Aditiya, “*Batik Geblek Renteng Kulon Progo; Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hak Cipta Produk Lokal oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo*”. dalam Jurnal Komunitas : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 10, No. 2 Desember 2019.
- Ria Aryatiningsih, “*Membangun Regional Branding Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dibalik Gerakan Bela-Beli Kulon Progo*” Skripsi. (Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Universitas Mercubuana Yogyakarta, 2017)
- Dll.

Daftar Website Rujukan

- Justita Dura, ” *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, SKebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*”. Dalam <https://lp2m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2018/04/4.-JURNAL-JUSTITA-DURA-JIBEKA-VOL-10-NO-1-AGUSTUS-2016.pdf>, diakses 1 September 2018
- Badan Pusat Statistik 2020, dalam <https://www.bps.go.id/publikation/2007/09/30/1a812bd2a8620ea5033180d9/indikator-kesejahteraan-rakyat-2006.html>. diakses 20 Januari 2020.

- Prof. Dr. Susetiawan, ” *Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme* ”. dalam <https://pspk.ugm.ac.id/2009/07/15/pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat-sebuah-ketidakberdayaan-para-pihak-melawan-konstruksi-neoliberalisme/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Bagus Kurniawan, “ *Bela Beli Kulon Progo* “ *Spirit dan Sukses Bupati Hasto Angkat Produk Lokal*,. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-3102031/bela-beli-kulonprogo-spirit-dan-sukses-bupati-hasto-angkat-produk-lokal> diakses pada 20 Januari 2020.
- Redaksi, “ *Bela Beli dan TomiRa Antarkan dr. Hasto Raih Bintang Jasa Utama* ”. dalam https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/web/view_berita/4379/Bela-Beli-dan-TOMIRA-Antarkan-dr-Hasto-Raih-Bintang-Jasa-Utama. Diakses pada 21 januari 2020.
- Redaksi, “ *Entaskan Kemiskinan dengan Bela Beli Kulon Progo* ”, dalam <https://beliindonesia.com/entaskan-kemiskinan-dengan-bela-dan-beli-Kulon-Progo/>diakses 1 Januari 2020
- “ *Geliat Batik Lendah Kulon Progo; dari Para Buruh Menjadi para Boss.* ”, dalam <https://lendir.kulonprogokab.go.id/detil/543/geliat-batik-lendah-kulon-progo-dari-buruh-menjadi-para-boss>, diakses pada 5 februari 2020

- Dani Julius Zebua, “*Kisah Kang Girin, dari Buruh hingga Bawa Desanya Jadi Kampung Batik Terkenal*”, dalam <https://regional.kompas.com/read/2018/03/24/10485821/kisah-kang-girin-dari-buruh-hingga-bawa-desanya-jadi-kampung-batik-terkenal?page=all>. Diakses pada 5 februari 2020.
- “*Lendah, sentra Batik Yogyakarta*”, dalam <https://lendah.kulonprogokab.go.id/detil/250/lendah-sentra-batik-yogyakarta>, diakses pada 5 februari 2020.
- Harun Susanto, “*Industri Batik Berkembang Baik di Kulon Progo*”, dalam http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/579146/ekonomi/industri_batik_berkembang_baik_di_kulon_progo.html, diakses pada 5 februari 2020.
- Eddy Flo, “*Geblek Renteng, Motif Batik Khas Kulon Progo*”, <https://merahputih.com/post/read/geblek-renteng-motif-batik-khas-Kulon-Progo> diakses 1 September 2018
- <https://travel.kompas.com/read/2018/06/20/102600527/mampir-ke-kulon-progo-wajib-borong-batik-khasnya> diakses 1 September 2018
- Singgih Wahyu Nugraha, “*ToMiRa Efektif Perluas Pasar UMKM di Kulonprogo*” <https://jogja.tribunnews.com/2018/10/02/tomira-efektif-perluas-pasar-umkm-di-kulonprogo>. Diakses tanggal 2 Mei 2020
- “*Sejarah Lahirnya Motif Geblek Renteng yang Mengangkat Industri Batik di Kulon Progo*”, lihat. <https://lendah.kulonprogokab.go.id/detil/404/sejarah-lahirnya-motif-geblek-renteng-yang-mengangkat-industri-batik-di-kulon-progo>. Diakses pada tanggal 2 mei 2020.

- “*Filosofi dan Sejarah Batik Motif Geblek Renteng dari Kulon Progo*”
<https://www.motifbatik.web.id/2019/01/filosofi-dan-sejarah-batik-motif-geblek.html>. Diakses pada tanggal 02 Mei 2020.
- Bagus Kurniawan – detikNews, “*Batik Motif Geblek Renteng dan 'Bela Beli Kulonprogo' ala Bupati Hasto*”. Lihat.
<https://news.detik.com/berita/d-3102521/batik-motif-geblek-renteng-dan-bela-beli-kulonprogo-ala-bupati-hasto>. Diakses pada 3 Mei 2020
- Dll.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran

Pedoman Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemilik Usaha Batik (Sembung dan Sambayung Batik)

- Bagaimana latar belakang usaha anda berdiri?
- Bagaimana keadaan usaha anda sekarang?
- Berapa jumlah karyawan yang anda kelola?
- Bagaimana model manajemen yang anda pakai dalam mengatur keberlangsungan usaha anda?
- Apa saja fasilitas yang anda miliki?
- Apa saja yang menjadi tantangan dalam perjalanan usaha anda?
- Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut sejauh ini?
- Apa saja yang menjadi pendukung dalam perjalanan usaha anda?
- Apakah pernah mengetahui tentang kebijakan geblek renteng?
- Bagaimana pemahaman anda terhadap kebijakan geblek renteng tersebut?
- Bagaimana peran anda dalam pelaksanaan kebijakan geblek renteng tersebut?
- Bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?
- Apa saja program dari kebijakan tersebut yang anda ikuti?
- Bagaimana dampak dari kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan usaha anda?
- Apakah ada forum dialog antar sesama pembatik di Gulurejo?
- Bagaimana peran forum tersebut dalam keberlangsungan usaha anda?
- Apakah ada peran dari luar pemerintah maupun sesama pembatik dalam keberlangsungan usaha anda?

- Apakah ada tantangan lain yang hadir disebabkan dari kebijakan ini?
- Apakah ada harapan lain terhadap kelangsungan kebijakan ini?
- Apakah ada kritikan anda terhadap kebijakan ini?

2. Wawancara Kepada Pemerintah Desa Gulurejo

- Bagaimana gambaran umum Desa secara geografis?
- Bagaimana gambaran umum penduduk Desa?
- Bagaimana gambaran umum tingkat pendidikan dan ekonomi penduduk Desa?
- Bagaimana kondisi Desa sebelum dan sesudah kebijakan geblek renteng?
- Bagaimana keterlibatan pemerintah Desa terhadap berlangsungnya kebijakan tersebut?
- Bagaimana pola komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah Desa terhadap para pengusaha batik dan dinas sebagai aktor utama dari penerapn kebijakan?
- Apa saja kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dari sudut pandang pemerintah Desa?
- Apa saja faktor yang menjadikan kendala-kendala tersebut terjadi?
- Apakah ada harapan lain terhadap kelangsungan kebijakan ini?
- Apakah ada kritikan terhadap kebijakan ini?

3. Wawancara Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Kulon Progo

- Bagaimana proses implementasi kebijakan geblek renteng di Desa Gulurejo?
- Apa saja program yang telah dilakukan oleh Dinas kepada pembatik di Desa Gulurejo?

- Bagaimana evaluasi kebijakan ini sejak awal diterapkan hingga saat ini?
- Apa indikator yang menjadi dasar evaluasi tahunan Dinas terhadap kebijakan atau program lain hasil kebijakan geblek renteng di Desa Gulurejo?
- Apa saja kendala terhadap penerapan kebijakan ini di Desa Gulurejo?
- Apakah ada harapan lain terhadap kelangsungan kebijakan ini?
- Apakah ada kritikan terhadap kebijakan ini?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Foto Dokumentasi

Wawancara bersama Bapak Supardal, Ketua Bidang Pembangunan Desa Gulurejo



Potret jalanan di Desa Gulurejo

Wawancara bersama Ibu Tri Driyanti dan Staff, Ketua Bidang Industri, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Kulon Progo.



Penulis di depan Baliho pertanggungjawaban APBDesa Gulurejo, halaman kantor Kelurahan Gulurejo.

Wawancara bersama Ibu Murti, Pemilik Sembung Batik di Desa Gulurejo



Wawancara bersama Bapak Purnomo Pemilik Sambayang Batik di Desa Gulurejo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Syaiful Isnanun Thoha
Tempat/Tgl Lahir : Kulon Progo, 07 oktober 1997
Alamat : Patuk Kidul, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo, D.I.Y
HP : 082338603163
Email : syaiulthoha@gmail.com
Nama Bapak : Sunarto
Nama Ibu : Siti Mufiroh

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Trayu
2. MTsN Wonokromo Bantul
3. MAN WATES 1
4. UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 11 September 2020

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syaiful Isnanun Thoha
NIM 15230070